

RESOLUSI GENCATAN SENJATA DI JALUR GAZA DAN RESPONS INDONESIA

Lisbet*

1

Abstrak

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah menyetujui Resolusi Gencatan Senjata di Jalur Gaza pada 10 Juni 2024. Hamas dan Islamic Jihad (Jihad Islam) telah merespons positif resolusi gencatan senjata tersebut. Sementara Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu masih bersikeras bahwa Israel hanya akan mengakhiri konflik setelah 'menghancurkan' Hamas. Tulisan ini menganalisis bagaimana keberhasilan DK PBB dalam mengeluarkan resolusi gencatan senjata di Jalur Gaza dan respons Indonesia. Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid mengecam tindakan keji Israel dan meminta adanya gencatan senjata secara permanen. Hafid juga menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap upaya Menteri Pertahanan dan TNI untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian dan tenaga medis apabila mendapatkan mandat dari PBB. Komisi I DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan dapat mendukung Kementerian Pertahanan dan TNI dalam memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban sipil Palestina sekaligus mendukung upaya perdamaian kedua pihak dalam mewujudkan two-state solution.

Pendahuluan

Pada 10 Juni 2024, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa - Bangsa (DK PBB) telah menyetujui Resolusi DK PBB No. 2735 yang diusulkan oleh Amerika Serikat (AS) terkait Rencana Gencatan Senjata dan Pembebasan Sandera di Jalur Gaza. Resolusi ini diharapkan menjadi solusi terhadap serangan militer Israel selama delapan bulan yang telah menghancurkan Jalur Gaza.

Resolusi yang mendukung gencatan senjata permanen didukung oleh 14 negara dan 1 abstain yakni Rusia. 14 negara yang mendukung terdiri dari 4 negara Anggota Tetap DK PBB yakni Amerika Serikat, Inggris, China, Perancis serta 10 negara Anggota Tidak Tetap DK PBB yakni Aljazair, Ekuador, Guyana, Jepang, Malta, Mozambik, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia dan Swiss. Secara garis besar, resolusi tersebut

* Analis Legislatif Ahli Madya, Bidang Politik Hukum dan Keamanan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI. Email: lisbet@dpr.go.id.



direspons secara positif oleh Hamas dan *Islamic Jihad* (Jihad Islam). Mereka menyampaikan kesiapannya untuk bekerja sama dengan negosiator dalam menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam resolusi tersebut. Kendati demikian, mereka menyerukan penghentian total terhadap agresi Israel di Jalur Gaza (Yulianingsih, 2024).

Melalui resolusi tersebut, DK PBB semakin menegaskan komitmennya untuk mewujudkan *two-state solution*. Apabila implementasi dalam ketiga fase resolusi tersebut dapat direalisasikan maka gencatan senjata permanen dapat diwujudkan. Tulisan ini menganalisis bagaimana DK PBB mengeluarkan resolusi gencatan senjata di Jalur Gaza dan respons Indonesia.

Resolusi Gencatan Senjata DK PBB

Resolusi 2735 berpotensi mengikat secara hukum karena telah diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB. Resolusi tersebut mengikat Israel secara hukum namun tidak mengikat ke Hamas karena Hamas bukan sebuah negara. Namun, Israel masih belum memberikan respons positif. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu masih bersikeras bahwa Israel hanya akan mengakhiri konflik setelah 'menghancurkan' Hamas dan membebaskan para tawanan yang tersisa. Pernyataan Perdana Menteri Netanyahu diperkuat oleh Perwakilan Israel untuk PBB Reut Shapir Ben-Naftaly yang menyatakan bahwa Israel tidak akan mengakhiri konflik sampai kemampuan Hamas dihancurkan (Yulianingsih, 2024).

Ada tiga fase dalam Resolusi DK PBB 2735. Pada fase pertama, kedua pihak diharapkan dapat melakukan negosiasi gencatan senjata selama 6 minggu. Israel diharuskan untuk

menarik mundur pasukan dari kawasan padat penduduk. Kedua pihak juga harus membebaskan sandera perempuan, lansia dan yang terluka. Para pengungsi Palestina juga diharapkan dapat diizinkan pulang ke rumahnya. Implementasi fase ini masih harus menghadapi sejumlah tantangan. Hamas berkeras tidak akan membebaskan sandera kecuali terjadi gencatan senjata skala penuh yang diikuti mundurnya pasukan Israel. Selain itu, masih belum terdapat kesepakatan antara kedua pihak terkait daftar nama para pemimpin politik dan militan senior yang dihukum karena ikut mengatur serangan mematikan ke Israel. Siapa saja di antara mereka yang akan dibebaskan di Gaza, di Tepi Barat, atau justru diasingkan.

Pada fase kedua, Israel diharapkan menarik mundur seluruh pasukan dari wilayah Gaza dan semua sandera telah dikembalikan dan lebih banyak tahanan Palestina yang dibebaskan. Implementasi fase ini juga tidak akan berjalan dengan mudah karena terdapat kekhawatiran Hamas bahwa Israel akan tetap melanjutkan perang setelah sandera dibebaskan.

Pada fase ketiga, pemulangan jenazah sandera yang meninggal ke keluarga, gencatan senjata permanen dimulai dan pembangunan ulang Gaza akan segera dimulai (Amaranggana, 2024). Tantangan dari fase ini adalah Israel tidak bersedia mundur sebelum menghancurkan kekuatan militer Hamas karena Hamas akan terus memegang kendali di Jalur Gaza dan masih mampu mempersenjatai dirinya kembali apabila tidak dihancurkan.

Meskipun ada banyak tantangan dalam setiap fase, dengan banyak negara yang terlibat maka diharapkan resolusi ini dapat memberikan *soft* dan *hard pressure* bagi kedua pihak. Di

samping itu, menurut Wakil Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES), Ryantori, jika dilihat dari ketiga fase tersebut maka dapat dikatakan bahwa kedua pihak akan mendapatkan *win-win solution*. Dengan solusi ini maka perdamaian antara Israel dan Palestina dapat terwujud.

Respons Indonesia

Perkembangan upaya gencatan senjata di Jalur Gaza selalu menjadi perhatian DPR RI. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengecam tindakan keji Israel di Rafah dan meminta adanya gencatan senjata secara permanen. Kecaman ini disampaikan pada pertemuan bilateral dengan Kedutaan Besar Kanada, Jess Duttin (Parlementaria, 2024a). Selain itu, Meutya pada Rapat Kerja Komisi I dengan Wakil Menteri Pertahanan Panglima TNI M. Herindra juga menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap upaya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk mengevakuasi korban sipil dan tenaga medis untuk merawat korban sipil serta rencana mendirikan rumah sakit lapangan di Jalur Gaza (Parlementaria, 2024b).

Apabila mendapatkan mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Meutya meminta seluruh pihak untuk mendukung upaya pengiriman pasukan perdamaian ini karena Indonesia telah memiliki pengalaman terkait pasukan penjaga perdamaian sejak tahun 1957. Di samping itu, Meutya juga menyatakan dukungannya terhadap resolusi ini karena dapat menjadi solusi

jangka pendek terhadap gencatan senjata dan solusi jangka panjang terhadap *'two-state solution'* atau kemerdekaan sepenuhnya bagi Palestina (Parlementaria, 2024c). Anggota Komisi I Dave Laksono, juga mendukung upaya ini. Menurut Dave, Indonesia sudah cukup rutin mengirimkan pasukan perdamaian ke sejumlah negara selama puluhan tahun. Jadi, apabila PBB menugaskan Indonesia untuk mengirimkan pasukan perdamaianya, maka Indonesia dapat dengan segera melakukan hal tersebut (Parlementaria, 2024c).

Selain DPR RI, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengungkapkan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi pada semua upaya yang dapat mengarah pada gencatan senjata dan mengambil bagian pada setiap fase dari resolusi tersebut. Kesiapan ini semakin menegaskan dukungan Indonesia atas kemerdekaan serta kedaulatan Palestina. Kesiapan ini disampaikan pada Konferensi Darurat terkait Tanggapan Kemanusiaan Gaza: *Call for Action: Urgent Humanitarian Response for Gaza* yang telah dilaksanakan di Amman, Yordania pada 11 Juni 2024. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat, Mesir dan Qatar dalam upaya mediasi kedua pihak agar memastikan perundingan berjalan dengan baik sehingga perdamaian dapat terwujud (Susilo, 2024).

Indonesia juga akan merespons resolusi ini dengan cara mengevakuasi 1.000 korban sipil Palestina untuk dirawat di Rumah Sakit milik TNI di Indonesia jika Pemerintah Indonesia mendapatkan mandat dari DK PBB. RS ini antara lain Rumah Sakit Pusat

Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto dan Rumah Sakit Panglima Besar Soedirman. Kedua rumah sakit tersebut dapat menampung pasien hingga 1.000 orang. Seluruh korban sipil Palestina akan mendapatkan penanganan medis yang berkualitas. Selain pengobatan medis, TNI juga akan menyediakan petugas khusus untuk menangani trauma para korban perang (Qodar, 2024).

Sedangkan untuk evakuasi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah memastikan pihaknya untuk menyiapkan 3 unit pesawat milik TNI Angkatan Udara (AU). Ketiga pesawat tersebut yakni jenis Boeing-737 400/500 yang dapat menampung sebanyak 41 kru, 86 penumpang dan logistik seberat mencapai 10.000 kg serta Hercules C-130 Tipe J yang dapat menampung kru dan penumpang sebanyak 51 orang dan Tipe H sebanyak 55 orang (Qodar, 2024). Tidak hanya itu saja, TNI juga akan menyiapkan bantuan lanjutan berupa Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk dijadikan rumah sakit apung, alutsista tambahan hingga bantuan logistik. Bahkan atas inisiatif dari Mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan tokoh-tokoh Pemimpin Pondok Pesantren yang menyatakan kesiapannya untuk menampung anak yatim piatu yang terkena trauma ke sejumlah pesantren di Jawa Timur (Qodar, 2024).

Penutup

Resolusi DK PBB 2735 dapat dianggap sebagai hukum internasional dan bersifat mengikat secara hukum. Resolusi DK PBB untuk gencatan senjata di Jalur Gaza ini memiliki arti penting karena adanya peran aktif dari Amerika Serikat. Amerika

Serikat yang merupakan sekutu dari Israel justru menginisiasi resolusi dan menjadi pihak yang ikut bertanggung jawab di dalam implementasi resolusi tersebut. Selain itu, DK PBB pun dapat menerapkan tindakan hukuman tambahan terhadap Israel.

Komisi I DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan dapat mendukung Kementerian Pertahanan dan TNI dalam memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban sipil Palestina sekaligus mendukung upaya perdamaian kedua pihak dalam mewujudkan two-state solution. Solusi ini diharapkan dapat menjadi solusi akhir yang akan menekankan kepada Israel dan Palestina untuk hidup berdampingan secara damai di dalam perbatasan yang aman dan diakui.

Referensi

- Amaranggana, Paramita, & Patnistik, E. (2024, Juni 14). Inilah poin-poin perdebatan dalam negosiasi gencatan senjata Israel-Hamas. *Kompas*. <https://internasional.kompas.com/read/2024/06/14/075205970/inilah-poin-poin-perdebatan-dalam-negosiasi-gencatan-senjata-israel?page=all#page2>
- Komisi I apresiasi peran TNI pada misi kemanusiaan di Gaza. (2024b, Juni 7). *Parlementaria*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49870/t/Komisi%20I%20Apresiasi%20Peran%20TNI%20pada%20Misi%20Kemanusiaan%20di%20Gaza>
- Komisi I dukung rencana kirim pasukan perdamaian RI ke Gaza. (2024c, Juni 7). *Parlementaria*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49870/t/Komisi%20I%20dukung%20rencana%20kirim%20pasukan%20perdamaian%20RI%20ke%20Gaza>

dpr.go.id/berita/detail/id/49867/t/Komisi%20I%20Dukung%20Rencana%20Kirim%20Pasukan%20Perdamaian%20RI%20ke%20Gaza.

Muhammad, M. (2024, Juni 01). Prabowo Sugianto: Indonesia siap kirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2024/06/01/prabowo-subianto-indonesia-siap-kirim-pasukan-penjaga-perdamaian-ke-gaza>

Para pemimpin G7 bersatu mendukung 'gencatan senjata' di Gaza. (2024, Juni 16). *Antara*. <https://www.antaranews.com/berita/4153926/para-pemimpin-g7-bersatu-mendukung-gencatan-senjata-segera-di-gaza>

Qodar, N. (2024, Juni 15). Panglima TNI siapkan 3 pesawat untuk angkut warga palestina ke Indonesia. *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/news/read/5620546/panglima-tni-siapkan-3-pesawat-untuk-angkut-warga-palestina-ke-indonesia>

Susilo, N. (2024, Juni 13). Lobi negara-negara dunia, Prabowo dorong gencatan senjata di Gaza. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2024/06/13/prabowo-lobi-negara-negara-dunia-dorong-gencatan-senjata-di-gaza>

Terima Dubes Kanada, Komisi I dan Dubes sepakat kecam tragedi Rafah. (2024a, Juni 5). *Parlementaria*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49843/t/Terima%20Dubes%20Kanada,%20Komisi%20I%20dan%20Dubes%20Sepakat%20Kecam%20Tragedi%20Rafah>

Yulianingsih, T. (2024, Juni 13). Headline: DK PBB setuju resolusi gencatan senjata Palestina-Israel, realisasinya?. *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/global/read/5618592/headline-dk-pbb-setujui-resolusi-gencatan-senjata-palestina-israel-realisasinya>.